



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

***Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam
Meningkatkan Ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2014 - 2017***

Skripsi

Oleh

Malvin Vilio

2014330002

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014

***Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam
Meningkatkan Ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2014 - 2017***

Skripsi

Oleh

Malvin Vilio

2014330002

Pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S. IP., M.A.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Malvin Vilio
Nomor Pokok : 2014330002
Judul : *Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dalam Meningkatkan Ekspor Indonesia ke Jepang Tahun 2014 - 2017*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 24 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Stanislaus Risadi Apresian, S. IP., M. A.

:

Sekretaris merangkap pembimbing

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

:

Anggota

Giandi Kartasmita, S. IP., M. A.

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Malvin Vilio

NPM : 2014330002

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* dalam Meningkatkan Ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2014 - 2017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Juli 2018



Malvin Vilio

ABSTRAK

Nama : Malvin Vilio
NPM : 2014330002
Judul : *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*
dalam Meningkatkan Ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2014 -
2017

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA sebagai kerjasama bilateral mengandung berbagai elemen ekonomi yang menunjang pertumbuhan ekonomi kedua negara. Peran serta individual (rumah tangga) sangat penting disamping peran pemerintah sebagai pengambil keputusan. Tanpa adanya peran serta rumah tangga, kestabilan ketahanan pangan akan terancam. IJEPA adalah modal bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan perekonomiannya, terutama melalui sektor pertanian, sehingga dapat dirumuskan pertanyaan penelitian berupa **“Bagaimana Kerjasama Indonesia-Jepang melalui *Economic Partnership Agreement (EPA)* dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2014 - 2017?”**. Jepang sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia dan salah satu investor terbesar di Indonesia memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor pertaniannya secara lebih maksimal.

Keadaan sektor pertanian Indonesia hanya baik saat masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang dapat dilihat dari tercapainya swasembada pangan. Namun, kondisi sektor pertanian Indonesia kemudian semakin memburuk hingga pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang kembali membangun dan mengembangkannya. Program dan kebijakan yang sesuai, serta peran dari individu/rumah tangga, memberikan dampak positif bagi sektor pertanian Indonesia. Hal tersebut membantu mencegah terpuruknya ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2017, yang tercermin dari surplus produksi beras di tahun tersebut.

Kata Kunci: IJEPA, Pangan, Rumah Tangga

ABSTRACT

Name : Malvin Vilio
Student Number: 2014330002
Title : Economic Partnership Agreement between Indonesia and Japan (IJEPA) in Increasing Indonesia's Exports to Japan on 2014 - 2017

*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement or IJEPA is a bilateral cooperation containing various economic elements that support the economic growth of both countries. The participation of individuals (households) is very important besides the role of government as a decision maker. Without the participation from households, the stability of food security will be threatened. IJEPA is an asset for Indonesia to be able to develop its economy, especially through the agricultural sector, so the research question can be formulated as such, "**How Indonesia-Japan Cooperation through Economic Partnership Agreement (EPA) can increase Indonesia's exports to Japan on 2014 - 2017?**". Japan, as one of Indonesia's major trading partners and one of the biggest investors in Indonesia, provides a great opportunity for Indonesia to fully develop its agricultural sector.*

The condition of agricultural sector in Indonesia was only decent during the reign of President Soeharto, which could be seen by achieving self-sufficiency in food. However, the condition then worsen until the reign of President Joko Widodo, who re-built and developed Indonesia's agricultural sector. Appropriate programs and policies, along with the role of individual/household, made a positive impact on Indonesia's agricultural sector. It will help prevent food security degradation in Indonesia in 2017, which is reflected in the surplus of rice production that year.

Key Words: IJEPA, Food, Households

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menulis skripsi ini dengan berjudul “*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Ketahanan Pangan Indonesia 2014 - 2017*” Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik Strata Satu Universitas Katolik Parahyangan. Tentunya penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan dalam berbagai aspek. Saya menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, saya berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun agar kemudian skripsi ini dapat diperbaiki segala kekurangannya.

Skripsi ini tersusun bukan hanya sekedar hasil kerja saya seorang diri. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai, secara khusus kepada:

1. Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, selaku dosen pembimbing saya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dan niat baiknya bersedia membimbing saya hingga dapat mengikuti sidang skripsi dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan terhadap penulisan skripsi saya dalam setiap bimbingannya.

2. Sylvia Yazid, Ph.D, selaku dosen dan Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, terima kasih banyak atas pengajaran dan motivasinya saat di kelas Bahasa Inggris HI (BIHI) sehingga meningkatkan keinginan saya untuk belajar lebih giat lagi dan juga telah menyetujui skripsi saya agar dapat disidangkan.
3. Seluruh dosen program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar di setiap kelas yang saya ambil selama saya berkuliah dan memberikan wawasan serta pengetahuan yang tak ternilai harganya serta membuat saya menjadi mahasiswa yang berpikiran lebih luas dan terbuka.
4. Kedua Orang Tua saya yang telah merawat dan memenuhi semua kebutuhan saya terutama dalam hal pendidikan, dan selalu mendukung saya untuk dapat menyelesaikan skripsi saya agar dapat menyelesaikan studi saya di jenjang perguruan tinggi ini.
5. Adik saya, Dennis, yang telah membantu saya memenuhi persyaratan untuk mengikuti sidang dan selalu mendukung saya dalam segala hal.
6. Maria dan Olivia, selaku teman yang sangat *supportif* dan banyak sekali membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberikan informasi terkait semua persyaratan skripsi dan sidang yang diperlukan serta banyak meluangkan waktu untuk menemani saya selama pengerjaan skripsi ini.
7. Melisa, Elizabeth, Kevin, Khalif, Rio, Agung, Tony, Farhan, Claudia, dan Dita selaku teman-teman seperjuangan di kampus yang telah menjadi teman

yang sangat baik dan menemani hari-hari saya selama berkuliah di Bandung.

8. Seluruh teman-teman HI UNPAR angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah berjuang bersama di HI UNPAR terutama pada saat Praktik Diplomasi dimana saat itu kita sangat kompak walaupun mewakili delegasi yang berbeda-beda.
9. Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Kabinet Inspirasi 2016/2017, terima kasih atas pengalaman berorganisasi yang sangat berharga selama 2 tahun sehingga membentuk saya juga menjadi pribadi saya yang seperti sekarang ini.
10. Seluruh Anggota Paduan Suara Mahasiswa UNPAR, terima kasih atas pengalaman yang diberikan sejak awal tahun 2014 hingga sekarang dan sekaligus menjadi wadah saya untuk berkreasi dan bahkan membawa nama UNPAR sehingga dikenal pihak luar kampus, pemerintah, dan luar negeri.
11. Dimas, Gisca, Alvin, Patre, Kadima, Miki, Gabriel, Iignes, Haerlin, Melli, Vina, Rani, Edu, Agoy, Garrian, dan Subhan selaku teman-teman di PSM UNPAR, terimakasih sudah menjadi orang-orang terbaik dalam hidup saya selama di UNPAR ini. Terima kasih atas segala waktu yang telah diluangkan untuk saya, baik untuk bercengkrama bersama hingga menghabiskan waktu bersama untuk *refreshing* dan bahkan menemani saya mengerjakan skripsi saya.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bagi seluruh pihak yang terlibat di dalam skripsi ini apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, 12 Juli 2018

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.2.1 Deskripsi Masalah	9
1.2.2 Pembatasan Masalah	14
1.2.3 Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan	15
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	15
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	15
1.4 Kajian Literatur	16
1.5 Kerangka Pemikiran.....	19
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.6.1 Metode Penelitian.....	25
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	25
1.7 Sistematika Pembahasan	26

BAB II: INDONESIA – JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)	28
2.1 Pengertian Umum IJEPA	28
2.2 Latar Belakang IJEPA.....	28
2.3 Pilar-Pilar IJEPA.....	30
2.4 Konsep IJEPA	31
2.5 Prinsip-Prinsip Umum IJEPA	43
2.6 Keuntungan dan Manfaat IJEPA.....	44
BAB III: SEKTOR PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PERTANIAN INDONESIA	46
3.1 Sektor Pertanian Indonesia.....	46
3.1.1 Keadaan Sektor Pertanian Indonesia	46
3.1.2 Masalah-Masalah yang Dihadapi Sektor Pertanian Indonesia	55
3.2 Kebijakan Pertanian Indonesia.....	57
BAB IV: IJEPA DALAM MENINGKATKAN EKSPOR INDONESIA KE JEPANG	75
4.1 Liberalisasi Perdagangan	75
4.2 Investasi.....	81
4.3 Pembinaan Sumber Daya Manusia	84
4.4 Pentingnya Peran Rumah Tangga	86
BAB V: KESIMPULAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Strategi Peningkatan Produksi Padi melalui Daya Dukung Lahan Sawah (Aspek: Biofisik).....	59
Tabel 3.2 Strategi Peningkatan Produksi Padi melalui Daya Dukung Lahan Sawah (Aspek: Sosial Ekonomi).....	61
Tabel 3.3 Strategi dan Kebijakan Peningkatan Produksi Padi Sawah di Indonesia (Aspek: Biofisik).....	63
Tabel 3.4 Strategi dan Kebijakan Peningkatan Produksi Padi Sawah di Indonesia (Aspek: Sosial Ekonomi).....	64
Tabel 3.5 Perkembangan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras serta Produktivitas Padi Tahun 2004 – 2013.....	70
Tabel 4.1 NERACA PERDAGANGAN INDONESIA dengan JEPANG Periode: 2013 – 2018.....	79

DAFTAR SINGKATAN

Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	: Bank Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
EPA	: <i>Economic Partnership Agreement</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FTA	: <i>Free Trade Area</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
Gema Palagung	: Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, dan Jagung
GKG	: Gabah Kering Giling
GKP	: Gabah Kering Panen
HPP	: Harga Pembelian Pemerintah
IFPRI	: <i>International Food Policy Research Institute</i>
IJEPA	: <i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement</i>
IPB	: Institut Pertanian Bogor
IP-Padi	: Indeks Pertanaman Padi
IUU	: <i>Illegal, Unregulated and Unreported</i>
Jokowi	: Joko Widodo
KADIN	: Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Kementan	: Kementerian Pertanian
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
KUKP	: Kebijakan Umum Ketahanan Pangan

Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
MFN	: <i>Most Favoured Nation</i>
PKE	: Paket Kebijakan Ekonomi
PP	: Peraturan Pemerintah
RTP	: Rumah Tangga Petani
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SDM	: Sumber Daya Manusia
SNI	: Standar Nasional Indonesia
TRIPS	: <i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UPOV	: <i>International Union for the Protection of New Varieties of Plants</i>
Upsus	: Upaya Khusus
US	: <i>United States</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketahanan Pangan

Pangan merupakan hak dasar yang harus diterima oleh setiap umat manusia untuk dapat menjalani hidupnya hari lepas hari. Sangat wajar bila kebutuhan manusia akan pangan tersebut selalu dijunjung tinggi setiap harinya. Maka dari itu, ketahanan pangan menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Ketahanan akan pangan yang menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan utama manusia tersebut sangat perlu dijaga agar kehidupan setiap manusia dapat terus berjalan dengan baik tanpa harus menderita karena kekurangan pangan atau makanan. Menjaga ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting untuk dapat dilakukan dan sangat perlu untuk diajarkan kepada generasi-generasi penerus karena tuntutan zaman setiap harinya terus bertambah, sehingga terkadang manusia lupa bagaimana caranya untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan yang baik dan stabil.

Sebelum melakukan hal-hal yang dapat menjaga ketahanan pangan agar tetap dalam kondisi yang baik, perlu diketahui pengertian secara umum terkait dengan ketahanan pangan itu sendiri. Menurut *World Food Programme*, ketahanan pangan merupakan suatu keadaan dimana semua orang atau masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang bergizi, cukup, dan aman di setiap

waktu untuk memelihara hidup mereka secara baik dan sehat.¹ Hal yang serupa juga dikemukakan oleh *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) di dalam artikelnya yang membahas topik *Food Security* dengan berdasarkan definisi dari *United Nations Committee on World Food Security*.² Sebenarnya istilah ‘Ketahanan Pangan’ atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *Food Security* ini terbentuk atau muncul pada tahun 1974 dalam Konferensi Pangan Dunia yang pada saat itu masih berupa sebuah konsep kebijakan baru. Dalam mendefinikan Ketahanan Pangan ini tidak dapat hanya terpaku pada satu definisi saja, karena terdapat sekitar 200 definisi dari berbagai pandangan yang ada.³

Jika melihat pengertian Ketahanan Pangan lainnya, terdapat beberapa perbedaan yang terkemuka. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Pangan nomor 7 Tahun 1996 dan juga pada *Food and Agriculture Organization* atau disingkat FAO di tahun 1996. Menurut Undang-Undang Pangan tahun 1996, sasaran yang ingin dijangkau dalam pemenuhan Ketahanan Pangan yaitu pada tingkat rumah tangga, sementara menurut FAO pada tahun 1996 sasarannya yaitu pada tingkat individu. Kemudian dilihat dari sisi syarat pangan yang harus dicapai, menurut Undang-Undang Pangan tahun 1996 syaratnya adalah cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Sedangkan menurut FAO 1996, syaratnya adalah pangan tersebut haruslah cukup, aman, bermutu, bergizi, serta sesuai dengan preferensi

¹ “What is food security?,” World Food Programme, accessed May 9, 2018, <https://www.wfp.org/node/359289>.

² “Food Security,” International Food Policy Research Institute, accessed May 9, 2018, <http://www.ifpri.org/topic/food-security>.

³ Drs. Syarifudin Hidayat, M.Si., Wawan Dharma Setiawan, SH., M.Si., Krismiyati Tasrin, ST., dan Susy Ella, S.Si., *Manajemen Ketahanan Pangan di Daerah*, ed. Drs. Syarifudin Hidayat, M.Si., Krismiyati Tasrin, ST., Susy Ella, S.Si. (Bandung: Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I – LAN), 2008), 9.

(kesesuaian baik dalam hal selera, kesukaan kebudayaan, maupun kepercayaan) dari konsumen.⁴

Dan dilihat dari indikator ketahanan pangannya, menurut UU Pangan 1996 perlu adanya ketercukupan di tingkat rumah tangga. Sementara menurut FAO pada tahun 1996, ketahanan pangan perlu dicapai dengan indikator kecukupan di tingkat individu, tingkat kualitas kesehatan individu yang baik, dan tingkat produktivitas individu yang tergolong aktif.⁵ Terdapat juga definisi ketahanan pangan yang tercantum dalam *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action* pada 13 – 17 November 1996 di Roma, Italia. Definisi yang tercantum tersebut yaitu sebagai berikut: “*Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.*”⁶ Semua definisi atau pengertian yang ada terkait dengan ketahanan pangan memang memiliki perbedaan satu sama lainnya, namun pada intinya semua pengertian tersebut mendefinisikan bahwa ketahanan pangan itu merupakan keadaan dimana setiap orang dapat mengakses makanan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhannya setiap saat untuk menjalani kehidupannya.

Elemen-elemen yang saling berkaitan dalam hal ketahanan pangan ini dapat disimpulkan kedalam 4 elemen, yaitu Ketersediaan (*Availability*), Akses (*Access*),

⁴ Purwiyatno Hariyadi, Sukarno, Eko Hari Purnomo, Sutrisno Koswara, Sumarto, and Virna Berliani Putri, *Ketahanan Pangan Sebagai Fondasi Ketahanan Nasional* (Bogor: Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology (SEAFAST) Center, Institut Pertanian Bogor, 2009), 9.

⁵ Hariyadi, et al. 2009

⁶ Drs. Syarifudin Hidayat, M.Si., Wawan Dharma Setiawan, SH., M.Si., Krismiyati Tasrin, ST., Susy Ella, S.Si., Op. Cit. hlm 10

Pemanfaatan (*Utilisation*), dan juga Stabilitas (*Stability*). Ketersediaan berarti berhubungan dengan penyediaan dan perdagangan pangan yang harus memperhatikan kuantitas dan kualitasnya melalui peningkatan sistem pertanian yang produktif, penggunaan sumber daya alam yang baik, serta melalui kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pangan. Akses berarti berhubungan dengan kemampuan fisik dan ekonomi seseorang untuk mengakses pangan terutama bagi para petani kecil dan masyarakat kecil agar dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka setiap hari. Pemanfaatan berarti meningkatkan nutrisi dan keamanan pangan dengan cara meningkatkan keanekaragaman makanan, mengurangi kerugian pasca panen, serta pendistribusian makanan secara baik. Dan Stabilitas berarti keamanan pangan setiap waktu yang dimana harga pangan juga terjangkau sehingga masyarakat miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan pangannya tanpa mengeluarkan biaya yang terlalu besar atau diluar kemampuan mereka.⁷

Ketahanan Pangan Nasional

Indonesia sebagai negara yang besar, tidak luput dari berbagai permasalahan yang mendera hingga sekarang. Sebagai negara yang besar, masalah yang dialami oleh Indonesia pun bukanlah masalah kecil. Salah satu masalah yang hingga sekarang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia adalah masalah ketahanan pangan nasional. Indonesia dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan pangan

⁷ "Food Security and Why It Matters," Australian International Food Security Research Centre, accessed May 12, 2018, <http://aci-ar.gov.au/aifsc/food-security-and-why-it-matters>.

masyarakatnya. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, diperlukan ketersediaan pangan yang besar pula.

Pangan sangatlah penting bagi keberlangsungan suatu negara. Hal tersebut dikarenakan pangan atau dalam kata lain adalah makanan, merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. Tanpa adanya pangan, kehidupan manusia tentunya akan terganggu. Jika kehidupan manusia terganggu maka akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam membangun suatu negara. Jika kinerja manusia di dalam suatu negara terganggu maka keberlangsungan suatu negara pun menjadi sangat rentan terhadap kehancuran.

Negara yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya setiap hari, akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebutlah yang perlu pemerintah Indonesia perhatikan. Masyarakat Indonesia sangat memerlukan pangan setiap harinya. Dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, masyarakat Indonesia sangat bergantung terhadap makanan atau pangan. Makanan atau pangan merupakan sumber tenaga serta sumber kekuatan bagi masyarakat Indonesia, sehingga dengan begitu setiap orang dapat menjalankan aktivitasnya masing-masing termasuk membangun bangsa Indonesia ini.

Dari tahun ke tahun Indonesia mengalami keadaan pangan yang fluktuatif. Ada kalanya dimana Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Bahkan mencapai titik dimana Indonesia dicap sebagai negara pengeksport pangan di dunia. Namun ada kalanya juga Indonesia berada di titik terendah hingga membuka keran impor secara besar-besaran. Dan bahkan terpuruk hingga mengalami krisis.

Indonesia dengan jumlah penduduknya yang besar, sangat penting untuk dapat mandiri secara pangan. Kemandirian pangan sangatlah penting bagi keberlangsungan negara Indonesia karena hal tersebut merupakan salah satu indikator suatu negara yang memiliki kedaulatan secara penuh. Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia jika tidak mandiri secara pangan. Dengan kemandirian pangan, maka kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Dan swasembada pangan bukan lagi menjadi mimpi masyarakat Indonesia belaka, melainkan dapat menjadi kenyataan dan terus-menerus dapat dipertahankan secara baik.⁸

Berbicara soal ketahanan pangan tidak hanya melulu soal ketersediaan pangan, melainkan juga keamanan pangan, pemerataan pangan, dan juga keterjangkauan pangan. Seluruh aspek-aspek tersebut menjadi hal yang penting untuk mencapai ketahanan pangan yang dicita-citakan oleh negara. Dengan pemenuhan seluruh aspek tersebut, situasi ketahanan pangan nasional Indonesia akan meningkat bahkan dapat mencapai level yang mensejahterakan masyarakat.⁹

Ketahanan pangan merupakan cita-cita sekaligus tujuan yang negara Indonesia sangat ingin capai. Berbagai usaha-usaha telah dilakukan oleh negara Indonesia untuk mencapai tujuan ketahanan pangan tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, perdagangan internasional pun dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lainnya. Termasuk perdagangan yang dilakukan oleh negara

⁸ Yunastiti Purwaningsih, "Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9, No. 1(2008): 1-27

⁹ Purwaningsih 2008

Indonesia dengan negara Jepang. Kedua negara ini sudah memiliki hubungan dagang yang dapat dibilang cukup baik.

Dapat dibilang cukup baik karena jarang terjadi permasalahan terkait perdagangan diantara keduanya. Justru keduanya memiliki hubungan dagang yang terus semakin kuat hingga terbentuk kerjasama-kerjasama ekonomi yang salah satunya adalah kerjasama Indonesia-Jepang dalam *Economic Partnership Agreement* atau EPA. Indonesia merupakan salah satu negara asal impor yang dilakukan oleh Jepang. Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi atau peringkat ke 10 sebagai negara asal impor yang dilakukan oleh Jepang. Hal tersebut menunjukkan hubungan ekonomi yang cukup baik dijalin oleh keduanya.¹⁰

Rumah Tangga dan Negara

Ketahanan pangan adalah tanggungjawab yang harus dicapai oleh suatu negara seperti Indonesia. Untuk mencapai level ketahanan pangan yang maksimal, diperlukan usaha maksimal pula oleh aktor-aktor yang ada di dalam negara. Aktor terpenting dalam mencapai ketahanan pangan yang baik adalah rumah tangga dan negara. Rumah tangga sebagai aktor yang paling dasar memiliki peran penting dalam mencapai kemandirian pangan. Rumah tangga merupakan “akar rumput” dari suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Segala aktivitas ekonomi terjadi dan dilakukan dalam tataran rumah tangga. Karena pemenuhan kebutuhan pangan kepada komunitas dan individu dilakukan oleh rumah tangga. Dengan adanya bantuan dari negara yang memiliki kewajiban

¹⁰ “Perkembangan Perdagangan Indonesia-Jepang Bulan : Januari 2015,” *Laporan Atdag Tokyo*, last modified March 2015, <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/04/30/report-1430385478.pdf>.

untuk menjamin hak-hak pangan setiap warga negaranya.¹¹ Negara sebagai pemegang kekuasaan berperan penting sebagai aktor paling fleksibel yang dapat menentukan kebijakan seperti apa yang tepat bagi pembangunan ketahanan pangan nasional. Oleh negara, segala keputusan terbaik diambil untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan dalam hal pangan.

Kerjasama Indonesia-Jepang

Kerjasama Ekonomi yang telah terjalin antara negara Indonesia dengan negara Jepang merupakan gambaran dari kuatnya hubungan ekonomi kedua negara. Dengan eratnya hubungan ekonomi negara Indonesia dengan negara Jepang tersebut memberikan keuntungan tentunya bagi kedua belah pihak, terutama negara Indonesia. Tujuan untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan mencegahnya agar tidak terpuruk dapat dicapai melalui kerjasama Indonesia-Jepang tersebut. Bukanlah hal yang mustahil bagi negara Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan nasional karena melihat prospek kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Jepang ini sangatlah baik. Memang diperlukan kerja yang sangat keras untuk dapat mencapai ketahanan pangan nasional yang stabil, namun dengan memaksimalkan kerjasama dengan negara Jepang maka akan dapat meringankan pekerjaan rumah pemerintah atau bahkan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan pangan nasional sehingga tercipta stabilitas ketahanan pangan nasional.

Berbagai kerjasama telah dijalin antara negara Indonesia dengan negara Jepang. Seperti yang telah disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan

¹¹ Purwaningsih 2008

peringkat ke-10 sebagai negara asal impor oleh Jepang. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan ekonomi kedua negara tersebut tergolong baik dan saling menguntungkan terutama bagi Indonesia. Pada bulan Januari 2015, neraca perdagangan antara Jepang dengan Indonesia bahkan surplus bagi Indonesia sejumlah US\$ 931,82 juta. Dan beberapa komoditi ekspor non migas utama Indonesia ke Jepang pun meningkat nilainya pada bulan Januari 2015, seperti *Ash and Residues* sebesar US\$ 92,38 juta, *Nickle Mattes; Nickle Oxide Sinters* sejumlah US\$ 90,41 juta, dan *Parts & Access For Tractors; Public Trans* sejumlah US\$28,73 juta.¹²

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Negara Indonesia dalam kapasitasnya telah menjalin hubungan yang baik dengan negara Jepang. Sebagai sesama negara Asia yang memiliki latar belakang sejarah bersama pula, hubungan baik tersebut terus terjalin dan bahkan terus berkembang hingga saat ini. Kedua negara telah melakukan kegiatan perdagangan yang sifatnya mutualisme atau dalam kata lain berarti saling menguntungkan satu sama lain. Dapat dikatakan seperti itu karena memang faktanya, kegiatan ekspor dan impor yang terjadi diantara kedua negara tersebut sangatlah aktif dan kian terus bertambah seiring berjalannya waktu. Berbagai komoditi banyak diekspor dan juga diimpor satu sama lain dengan jenis yang terus meningkat pula.

¹² Laporan Atdag Tokyo 2015

Berbagai komoditi penting yang diekspor oleh Indonesia ke negeri sakura tersebut diantaranya seperti minyak, gas alam cair, hasil-hasil tambang, batubara, udang, *pulp* atau bubur kertas, tekstil beserta produk-produk tekstilnya, perlengkapan listrik, mesin, dan lain sebagainya. Selain itu juga, komoditi-komoditi yang diimpor oleh Indonesia dari negeri matahari tersebut berupa mesin-mesin beserta suku-cadangnya, produk-produk plastik, produk-produk kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi, dan suku-cadang mobil. Dalam hal investasi pun negara Jepang memiliki posisi atau kedudukan yang terbilang sangat penting juga bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. 11,5 % secara keseluruhan jumlah investasi langsung negara Jepang di Indonesia, terhitung sejak tahun 1967 hingga tahun 2007. Dan di Indonesia terdapat kurang lebih 1000 lebih perusahaan Jepang yang beroperasi dan telah mempekerjakan lebih dari 32 ribu masyarakat atau pekerja Indonesia sehingga menjadikan negara Jepang sebagai salah satu negara yang menyediakan lapangan kerja terbanyak di Indonesia atau bagi penduduk di Indonesia.¹³

Dari keeratan hubungan ekonomi tersebut sangat memberikan dampak bagi keadaan perekonomian nasional di Indonesia. Dan hal tersebut tentu saja memberikan dampak pula terhadap kondisi ketahanan pangan di Indonesia. Kondisi ketahanan pangan suatu negara tidak akan terlepas dari keadaan ekonomi negara tersebut. Hal yang sama pun berlaku di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia

¹³ “Hubungan Perekonomian Indonesia-Jepang,” *Kedutaan Besar Jepang di Indonesia*, accessed October 13, 2017, http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html.

akan sangat menentukan apakah negara Indonesia akan memiliki kondisi ketahanan pangan yang stabil atau tidak.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jika melihat negara Jepang sebagai negara yang paling banyak memberikan lapangan pekerjaan bagi para pekerja-pekerja di Indonesia, kemudian investasinya yang terbilang besar di Indonesia, kegiatan ekspor-impor yang aktif dijalin bersama Indonesia, maka dengan demikian kondisi perekonomian Indonesia dapat berkembang dengan andil besar dari negara Jepang dan dapat menjaga kestabilan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Kerjasama yang terjalin diantara Indonesia dengan Jepang ini bukan berarti hanya sekedar kerjasama sementara ataupun hanya untuk mencapai tujuan jangka pendek belaka, melainkan kerjasama ini telah resmi ditandai dengan adanya perundingan resmi *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang disetujui oleh pemerintah kedua negara yaitu Indonesia dengan Jepang pada saat Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhono atau biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan panggilan bapak SBY, melakukan kunjungan resmi ke Jepang tepatnya pada bulan Juni tahun 2005. Melalui pertemuan resmi tersebut, kedua kepala negara yaitu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Jepang pada saat itu yaitu Mr. Shinzo Abe sepakat dan menandatangani surat persetujuan EPA pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2007 dan efektif serta mulai diimplementasikan pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2008 yang diharapkan kegiatan perdagangan serta investasi diantara kedua negara dapat terus meningkat dan semakin berkembang seiring berjalannya waktu.¹⁴ Dan

¹⁴ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia 2017

terbukti bahwa kegiatan perdagangan serta investasi diantara keduanya telah meningkat dan jauh berkembang dari sebelumnya. Bahkan sekarang semakin erat.

Perjanjian yang dijalin antara Indonesia dengan Jepang ini memiliki tujuan serta lingkup yang luas untuk mempererat kemitraan ekonomi diantara keduanya yang diantaranya kerjasama di bidang *capacity building*, liberalisasi, peningkatan investasi dan perdagangan dalam hal peningkatan arus barang lintas batas, investasi dan jasa, serta pergerakan tenaga kerja Indonesia dan Jepang. Kerjasama yang sangat terfokus dengan Jepang ini akan memberikan peningkatan ekspor produk dan jasa Indonesia, peningkatan investasi yang berasal dari Jepang, dan juga peningkatan kemampuan industri di Indonesia.¹⁵

Unsur-unsur utama yang terkandung didalam perjanjian Indonesia dan Jepang tersebut meliputi *Trade in Goods, Investment, Trade in Services, Movement of Natural Persons, Intellectual Property Rights, Cooperation, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, Government Procurement, Custom Procedures, Improvement of Business Environment, Dispute Avoidance and Settlement*.¹⁶ Unsur-unsur tersebut menjadi kesepakatan bersama demi keuntungan bersama. Melalui unsur-unsur tersebut pula Indonesia menempatkan dirinya agar dapat diuntungkan dalam hal ekonomi. Keuntungan ekonomi yang diterima Indonesia akan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Sehingga stabilitasnya dapat terjaga.

¹⁵ “Kerjasama Indonesia – Jepang, *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (IJ-EPA)*,” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, accessed October 13, 2017, <http://www.kemendag.go.id/id/perdagangan-kita/agreements>.

¹⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2017

Berbagai permasalahan terkait ketahanan pangan masih banyak terjadi terutama di Indonesia sehingga terus mengancam ketahanan pangan nasional Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut seperti laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat sehingga kebutuhan akan pangan pun juga ikut meningkat, rumah tangga petani atau RTP yang semakin berkurang pula dimana rumah tangga ini menjadi sangat penting bagi penyediaan pangan di pasar karena rumah tangga ini melakukan cocok tanam untuk mayoritas dijual ke pasaran sehingga penyediaan pangan bagi masyarakat dapat tetap stabil, konversi lahan yang sangat tinggi dimana jumlah konversi lahan pertanian mencapai 100 ribu hektare per tahunnya sementara pencetakan sawah baru per tahunnya hanya mencapai 50 ribu hectare, dan lain sebagainya.¹⁷ Dengan adanya permasalahan-permasalahan pangan yang masih melanda Indonesia, elemen-elemen yang menjadi indikator ketahanan pangan nasional akan sulit dicapai sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keterpurukan ketahanan pangan di Indonesia masih sering terjadi. Maka dari itu diperlukan adanya solusi dan dengan adanya kerjasama IJEPA dapat memberikan dampak bagi ketahanan pangan di Indonesia karena adanya transaksi ekonomi, investasi, dan lain sebagainya.

Sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu sejak tahun 2014 hingga sekarang, kondisi ketahanan pangan masih sangat rendah dan belum menjadi prioritas pemerintah untuk segera dibenahi. Tingkat perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian masih rendah, sehingga ketahanan pangan di Indonesia

¹⁷ Dainsyah Dain, "Akar Masalah Ketahanan Pangan Nasional di Masa Depan," *Kompasiana*, last modified April 14, 2015, https://www.kompasiana.com/dainsyah/akar-masalah-ketahanan-pangan-nasional-di-masa-depan_5535ac686ea834731dda42e2.

tidak stabil. Contoh nyata yang terjadi di Indonesia terkait dengan pengembangan di sektor pangan atau pertanian seperti laboratorium pengembangan tanaman jarak pagar di Nusa Tenggara Timur saja kondisinya sangat memprihatinkan tanpa adanya perawatan rutin sehingga tampilannya pun tidak jauh berbeda dengan laboratorium sebuah sekolah menengah.¹⁸ Harga pangan terutama beras seringkali mengalami lonjakan yang nilainya memberatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, para petani ikut menjadi korban melambungnya harga beras tersebut, yaitu sebanyak dua per tiga petani Indonesia yang menjadi konsumen beras dengan harga yang tingginya bahkan melebihi harga di negara tetangga dan negara lainnya.¹⁹

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lebih mendalam dan fokus maka penulis memandang variabel permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Penulisan penelitian ini dibatasi dengan melihat bagaimana kerjasama Indonesia-Jepang melalui *Economic Partnership Agreement* (EPA) dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2014 - 2017.

1.2.3 Perumusan Masalah

¹⁸ “Ketahanan Pangan di Indonesia Masih Rendah,” *Kompas.com*, last modified November 1, 2008, <https://nasional.kompas.com/read/2008/11/01/1143277/ketahanan.pangan.di.indonesia.masih.rendah>.

¹⁹ Aprillia Ika, “19,4 Juta Orang Indonesia Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Pangan,” *Kompas.com*, last modified April 3, 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/03/140000126/19-4-juta-orang-indonesia-tidak-dapat-memenuhi-kebutuhan-pangan>.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dikaji yaitu **“Bagaimana Kerjasama Indonesia-Jepang melalui *Economic Partnership Agreement* (EPA) dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2014 - 2017?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menggambarkan upaya menghindari terpuruknya ketahanan pangan di Indonesia melalui kerjasama dengan Jepang. Kemudian dengan langkah-langkah yang telah diketahui tersebut bagaimana hal tersebut dapat memberikan efek positif terhadap peningkatan ekspor Indonesia ke Jepang terlebih sudah dijalinnya *Economic Partnership Agreement* (EPA) diantara kedua negara tersebut. Selain itu, tujuan dari penulisan laporan penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan penulis dalam menempuh studi Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional dan dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, ekonomi politik sumber daya, ekonomi politik pembangunan, teori dalam hubungan internasional,

dan hal lainnya yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi pandangan serta input yang positif terhadap pemerintah dalam menjalani kerjasama ekonomi dengan Jepang, dan juga dapat memperkaya hasil-hasil penelitian yang ada di Universitas Katolik Parahyangan. Dan diharapkan bagi peneliti lainnya agar dapat melakukan kajian lanjutan terkait dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

1.4 Kajian Literatur

Penelitian yang dilakukan terkait dengan perjanjian ekonomi antara Indonesia dengan Jepang ini masih belum terlalu banyak dan penelitiannya didominasi masih berasal dari peneliti domestik atau dalam negeri Indonesia. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nurul Musjtari melalui jurnalnya yang berjudul "*The Impact of Trade Liberalization in the WTO Agreement on Food Security Indonesia*". Beliau mengatakan bahwa suatu kebijakan pembangunan yang baik seharusnya mengandung tiga unsur yaitu *ecological security, livelihood security, and food security*. Dalam hal *food security* atau ketahanan pangan di Indonesia, beliau memaparkan dampaknya ke dalam 7 (tujuh) poin. Yang pertama, menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan manfaat ekonomi yang lebih banyak dinikmati oleh sebagian besar penerima proteksi tersebut, salah satunya sektor makanan dan minuman atau *food and beverage*.²⁰

²⁰ Dewi Nurul Musjtari, "The Impact of Trade Liberalization in the WTO Agreement on Food Security Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 63, Th. XVI (Agustus, 2014), pp. 221-246.

Kedua, surplus perdagangan komoditas pertanian Indonesia cenderung menurun dari waktu ke waktu. Ketiga, liberalisasi perdagangan berpotensi memperluas akses pasar untuk Indonesia khususnya ke negara industri. Keempat, beberapa produk ekspor utama Indonesia akan mengalami pemotongan tarif cukup besar di pasar ekspor utama. Kelima, kesepakatan putaran Uruguay (*Uruguay Round*) diperkirakan akan meningkatkan pendapatan dunia secara signifikan dan terdistribusi secara luas diantara negara maju dan negara berkembang yang akan berdampak positif terhadap upah riil terutama di negara berkembang. Terakhir yaitu keenam, seberapa besar Indonesia akan memperoleh manfaat yang diterapkannya liberalisasi perdagangan melalui kesepakatan *Uruguay Round* tergantung juga pada upaya dalam membuka pasar Indonesia sendiri.²¹

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nurul Musjtari tersebut, fokus penelitiannya lebih kepada dampak-dampak positif dari kebijakan liberalisasi perdagangan yang dibuat oleh *World Trade Organization* atau biasa disingkat dengan WTO. Penjabaran dampak-dampaknya lebih ke arah positif, berbeda jika dibandingkan dengan penelitian ini. Penelitian ini justru lebih memfokuskan kepada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari liberalisasi perdagangan internasional dan penelitian ini lebih mengkhususkan kepada kerjasama Indonesia-Jepang EPA yang berdampak terhadap ketahanan pangan Indonesia yang terpuruk sebagai efek negatif dari liberalisasi perdagangan internasional.²²

²¹ Musjtari 2014

²² Musjtari 2014

Penelitian kedua dilakukan oleh Syntia Devi Larasati dengan jurnalnya yang berjudul “Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang dalam Indonesia Japan *Economic Partnership Agreement* Studi Kasus: Evaluasi Kebijakan Terhadap Eksploitasi Ikan Tuna di Wilayah Perairan Indonesia”. Beliau mengatakan bahwa pembuatan IJEPA tersebut belumlah 100% matang karena di dalamnya tercantum peraturan atau ketentuan terkait lingkungan namun belum diimplementasikan secara baik oleh kedua negara yaitu Jepang dan Indonesia dan hanya mengeksploitasi laut saja demi keuntungan semata. Selain itu pula, kesejahteraan nelayan tidak diperhatikan sehingga selain merusak lingkungan, nelayan Indonesia tidak sejahtera, padahal Indonesia memiliki keunggulan pada alamnya bahkan lebih dari Jepang. Penelitian yang dilakukan oleh Syntia Devi Larasati lebih menfokuskan kepada efek negatif dari IJEPA terhadap kondisi lingkungan di Indonesia terutama lautannya serta kesejahteraan nelayan yang sangat minim walaupun keuntungan yang diperoleh Indonesia melalui perjanjian tersebut cukup besar untuk dapat menjamin kesejahteraan nelayan. Berbeda dengan penelitian ini yang fokusnya bukan pada lingkungannya melainkan pada dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional di Indonesia.²³

Penelitian yang ketiga yaitu dibuat oleh Levi Gocklas C.S dan Sri Sulasmiyati melalui jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik Periode 2000-2016). Mereka mengatakan

²³ Syntia Devi Larasati, “Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Studi Kasus: Evaluasi Kebijakan Terhadap Eksploitasi Ikan Tuna di Wilayah Perairan Indonesia,” *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015, hal. 70-78.

melalui penelitiannya bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pemberlakuan IJEPA terhadap ekspor Indonesia ke Jepang yang dapat dilihat dari rata-rata nilai ekspor tahunan Indonesia ke Jepang yang meningkat signifikan setelah pemberlakuan IJEPA dan terhadap impor Indonesia ke Jepang yang dapat terlihat dari rata-rata nilai impor tahunan Indonesia ke Jepang yang meningkat signifikan setelah pemberlakuan IJEPA. Penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut berfokus kepada nilai ekspor dan nilai impor dari Indonesia terhadap Jepang.²⁴ Berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya berfokus kepada nilai ekspor dan impor Indonesia saja melainkan lebih kepada kerjasamanya yang berdampak pada ketahanan pangan nasional Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Struktur landasan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis kerjasama Indonesia-Jepang ini menggunakan teori *Sociological Liberalism*. Dimana teori tersebut mengatakan bahwa di dalam hubungan internasional, tidak hanya ada hubungan diantara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Namun terdapat aktor lain yaitu individual-individual, kelompok, dan masyarakat. Individual-individual yang saling berhubungan tersebut akan membentuk suatu komunitas internasional.²⁵ Sehingga selain negara, aktor lainnya yang berperan di dalam *Sociological Liberalism* ini adalah individual dan kelompok.

²⁴ Levi Gocklas C. S dan Sri Sulasmiyati, "Analisis Pengaruh Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik Periode 2000-2016)," *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB) Vol. 50, No. 5, September 2017, hal. 191-200.

²⁵ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press Inc., 2013), 103.

Di dalam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang terkait dengan ketahanan pangan, aktor yang berperan penting di dalamnya adalah individu, rumah tangga dan negara. Sehingga jika dilihat menggunakan teori *Sociological Liberalism*, maka dapat tergambar dengan jelas bahwa dalam kerjasama IJEPA ini terdapat sejumlah aktor selain negara yang memberikan dampak sekaligus berperan serta dalam menjalani kerjasama IJEPA ini. Memang jika menilik dari ilmu ekonomi, kebijakan perdagangan merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mempengaruhi ekspor-impor suatu negara.²⁶ Namun bukan berarti hanya pemerintah saja yang dapat memberikan dampak bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi di suatu negara. Terdapat individual, dan juga sektor rumah tangga dimana sektor ini juga penting dan merupakan pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian sekaligus menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan yang tentunya sangat penting terhadap kegiatan perekonomian suatu negara, seperti Indonesia ini.²⁷

Sociological Liberalism merupakan salah satu dari empat pemikiran utama Liberalisme, yang dimana konsep dari *Classical Liberalism* itu sendiri berfokus pada *freedom, cooperation, peace, dan progress*. Liberalisme percaya bahwa setiap manusia memiliki ego dan memiliki jiwa yang kompetitif pula, namun Liberalisme juga percaya bahwa masing-masing individu atau manusia saling berbagi kepentingan dan berkolaborasi serta bekerjasama dalam *social action* baik secara domestik maupun internasional.²⁸ Liberalisme yang salah satunya berfokus pada

²⁶ N. Gregory Mankiw, Euston Quah, dan Peter Wilson, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Singapore: Cengage Learning Asia Pte Ltd., 2008), 184.

²⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 37.

²⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen, Op. Cit. hlm 100-102

kerjasama ini dapat menjelaskan kerjasama yang terjalin dalam IJEPA yang dimana peran serta individual juga sangat penting terutama dalam hal agrikultur. Kerjasama perdagangan dan investasi merupakan kerjasama yang penting dalam IJEPA ini. Dengan begitu peran serta individual seperti petani yang bekerjasama dengan individual lain sehingga dapat memberikan dampak positif bagi IJEPA, terutama dalam hal perdagangan dan investasi.

Terkait dengan kerjasama secara umum, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa definisi dari kerjasama internasional, seperti pandangan adanya dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan untuk saling bertemu juga dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau pun dipenuhi oleh semua pihak secara sekaligus. Definisi lainnya yaitu persetujuan antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memanfaatkan kesamaan kepentingan atau pun juga perbedaan atau benturan kepentingan, selain itu juga harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang ditentukan oleh negara lain akan memberi keuntungan bagi negara tersebut dalam mencapai kepentingan serta nilai-nilainya. Kemudian terdapat juga definisi bahwa kerjasama internasional merupakan aturan resmi atau pun tidak resmi tentang transaksi yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kesepakatan, dan juga transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan atau perjanjian mereka.²⁹ Dalam kerjasama internasional, terdapat empat tahapan atau empat jenis kerjasama ekonomi internasional yaitu *Free Trade Area (FTA)* yang merupakan penghapusan atau dieliminasi *trade barriers* antara negara-negara yang melakukan kegiatan

²⁹ Zulkifli, "Kerjasama Ekonomi Internasional sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara," *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 3 No. 2 (Juli, 2014): 139-158, <https://media.neliti.com/media/publications/58555-ID-kerjasama-ekonomi-internasional-sebagai.pdf>.

dagang berupa pajak barang-barang impor bagi negara-negara yang terlibat didalamnya sesuai perjanjian. Selain itu, terdapat *Custom Union* yang merupakan kesepakatan antara negara-negara terkait dalam menentukan tarif umum eksternal yang diberlakukan juga bagi negara-negara non-anggota.³⁰

Kemudian terdapat juga *Common Market* yaitu penghapusan hambatan dagang secara fisik berupa tenaga kerja dan modal selain juga eliminasi bea tarif dan kuota agar lebih efisien. Dan juga *Economic Union* dimana negara-negara yang berada pada satu kawasan bersepakat untuk menyamakan kebijakan moneter dan fiskalnya.³¹ Untuk kerjasama Indonesia dan Jepang ini termasuk ke dalam kerjasama berjenis *Free Trade Area* yang dilakukan secara bilateral atau diantara dua negara saja. Kerjasama secara bilateral menguntungkan kedua belah pihak secara lebih maksimal. Kesepakatan diambil sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kedua negara.

Dalam melihat dampak dari kerjasama Indonesia-Jepang terhadap ketahanan pangan di Indonesia, perlu dilihat pula perbedaan antara ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan juga kemandirian pangan. Ketahanan pangan sendiri memiliki pengertian yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup

³⁰ Rolf Mirus dan Nataliya Rylska, "Economic Integration: Free Trade Areas Vs. Customs Unions," *Western Centre for Economic Research*, accessed July 11, 2018, <https://www.ualberta.ca/business/Centres/WCER/Publications/Other/~media/business/Centres/WCER/Documents/Publications/OtherPublications/NAFTA/NAFTArylska.ashx>.

³¹ Mirus dan Rylska 2018

sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan kedaulatan pangan memiliki pengertian sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Dan kemandirian pangan memiliki arti yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM, sumber daya sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.³² Jadi dapat dilihat bahwa ketahanan pangan merupakan kondisinya atau keadaannya, sedangkan kedaulatan pangan merupakan hak negara menentukan kebijakan dan kemandirian pangan merupakan kemampuan negara memproduksi pangan.

Deskripsi tersebut yang terkait dengan Pangan juga tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 yang menjadi validasi bagi pengertian ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan tersebut.³³ Terdapat juga elemen-elemen indikator yang perlu dicapai agar suatu negara dapat mencapai ketahanan pangan yang stabil, atau dalam kata lain juga berarti suatu negara dapat mencegah terpuruknya ketahanan pangan di Indonesia. Ketersediaan (*Availability*), Akses (*Access*), Pemanfaatan (*Utilisation*), dan juga Stabilitas (*Stability*) menjadi elemen yang jika dipenuhi oleh negara maka akan mencegah terjadinya keterpurukan

³² “Ketahanan Pangan,” BULOG, last modified 2014, <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>.

³³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,” *Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian*, last modified March 19, 2018, <http://bkp.pertanian.go.id/blog/post/undang-undang-republik-indonesia-nomor-18-tahun-2012-tentang-pangan>.

ketahanan pangan di Indonesia.³⁴ Dengan adanya kerjasama diantara Indonesia dengan Jepang, memperkecil kemungkinan terjadinya keterpurukan ketahanan pangan di Indonesia dengan berbagai keuntungan yang di dapat dari Jepang. Di dalam IJEPa itu sendiri, kedua negara memiliki *interests* nya masing-masing, seperti Jepang yang melakukan investasi di Indonesia untuk mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil investasinya tersebut. Dan bagi Indonesia, investasi dari Jepang memberikan keuntungan bagi Indonesia karena dapat dijadikan modal untuk membiayai kegiatan ekonomi di Indonesia seperti mensubsidi pupuk bagi para petani kecil, mencetak lahan persawahan baru, dan penunjang kegiatan ekonomi lainnya.

Interests dari Indonesia sebagian besar berkaitan dengan perdagangan atau ekspor (liberalisasi akses pasar), kesepakatan terkait skema tariff diantara kedua negara, dan pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas.³⁵ Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan agar dampak positifnya dapat mencegah terpuruknya ketahanan pangan di Indonesia. Karena keterpurukan pangan pernah terjadi di Indonesia dan sewaktu-waktu dapat terjadi kembali jika tidak dicegah, seperti terjadinya krisis kedelai pada tahun 2008 yang menyebabkan melonjaknya harga kedelai yang tentunya akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap kedelai, kemudian kenaikan harga bahan-bahan pokok pada tahun 2010

³⁴ Australian International Food Security Research Centre 2014

³⁵ Sigit Setiawan, "Analisis Dampak IJEPa Terhadap Indonesia Dan Jepang," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, last modified August 2, 2012, https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20dampak%20ijepa.pdf.

yang meresahkan warga, dan lain sebagainya.³⁶ Terpuruknya ketahanan pangan di Indonesia sangat perlu dicegah, dan kerjasama IJEPA menjadi jalan bagi Indonesia untuk dapat mewujudkannya serta kebutuhan masyarakat akan pangan pun akan terus dapat terpenuhi.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif untuk memberi gambaran dan analisis.³⁷ Dimana melalui metode ini, akan digambarkan dan dianalisis bagaimana kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam hal ekonomi dengan fokus *Economic Partnership Agreement* (EPA), dan bagaimana kerjasama tersebut dapat mencegah keterpurukan ketahanan pangan nasional di Indonesia. Sehingga dapat tergambar dengan jelas bagaimana kerjasama Indonesia-Jepang tersebut dapat menjaga ketahanan pangan di Indonesia tetap dalam keadaan yang baik.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menghimpun berbagai macam informasi yang tersedia, baik itu dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, laporan resmi dari

³⁶ Lidya Christin Sinaga, "Mempertanyakan Kembali Ketahanan Pangan Indonesia," *Pusat Penelitian Politik LIPI*, accessed May 13, 2018, <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-nasional/374-mempertanyakan-kembali-ketahanan-pangan-indonesia.html>.

³⁷ Dr. J. R. Raco, M.E., M.Sc., *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010).

kementerian/pemerintah, maupun melalui artikel-artikel berita yang telah dipublikasikan.³⁸ Semua sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut, disusun dan dielaborasi hingga menghasilkan suatu karya penelitian yang baik.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana 5 bab tersebut terdiri dari pendahuluan pada bab awal, pembahasan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) bab, dan terakhir merupakan kesimpulan serta rekomendasi yang terdiri dari 1 (satu) bab.

Bab 1 berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan pengumpulan data, serta sistematika pembahasan yang terkandung dalam penelitian. Di dalam bab ini akan digambarkan mulai dari permasalahan terkait dengan pangan dan pertanian Indonesia hingga bagaimana penelitian terkait permasalahan tersebut akan dilakukan untuk penulisan skripsi ini.

Bab 2 berisi tentang segala hal terkait dengan IJEPA. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian umum dari IJEPA, kemudian latar belakang IJEPA, 3 pilar IJEPA, konsep-konsep IJEPA, prinsip-prinsip umum IJEPA, dan juga keuntungan serta manfaat IJEPA. Bab ini memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai apa itu IJEPA, bagaimana IJEPA tersebut bias terbentuk dan ditandatangani, hingga bagaimana IJEPA tersebut memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia.

³⁸ Agus Setiawan, "Pengertian Studi Kepustakaan," *Transiskom*, last modified March 30, 2016, <http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>.

Bab 3 berisi tentang Sektor Pertanian dan Kebijakan Pertanian di Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan secara terperinci terkait dengan sektor pertanian di Indonesia, seperti kondisi pertanian Indonesia dari tahun ke tahun, peran sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, dan potensi, peluang, serta tantangan yang dihadapi oleh Indonesia terkait dengan sektor pertanian. Juga akan dijelaskan terkait dengan kebijakan pertanian di Indonesia mulai dari kebijakan produksi, kebijakan subsidi, kebijakan investasi, kebijakan harga, kebijakan konsumsi, hingga kebijakan pertanian di Indonesia secara khusus pada tahun 2014 hingga tahun 2017.

Bab 4 berisi tentang kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang yaitu *Economic Partnership Agreement* atau EPA yang dikaitkan dengan Ketahanan Pangan di Indonesia dan dikaitkan dalam hal pencegahan terjadinya keterpurukan ketahanan pangan di Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan dan dielaborasi serta dikaitkan variabel-variabel yang ada untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Akan digambarkan bagaimana IJEPA ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kegiatan ekspor Indonesia ke Jepang.

Bab 5 berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini. Dalam bab terakhir ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan penelitian yang dikaji dan rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintah terkait dengan kerjasama ekonomi dengan Jepang.